



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

20
22



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

i	DAFTAR ISI	26	Komposisi Dewan Pengawas Syariah
		27	Profil Dewan Pengawas Syariah
1	TATA KELOLA PERSEROAN	31	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
1	Komitmen Penerapan GCG	32	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris
1	Tujuan Penerapan GCG	33	Komite Audit
2	Dasar Penerapan GCG	38	Komite Nominasi dan Remunerasi
2	Struktur dan Mekanisme GCG	44	Komite Pemantau Risiko
3	Rapat Umum Pemegang Saham	50	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Direksi
5	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	54	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal
6	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	65	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi Informasi
7	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler	67	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan
8	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	71	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan
8	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	71	Rencana Strategis Perusahaan
8	Komposisi Direksi	75	Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (Lima per Seratus) atau Lebih, yang meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham
9	Profil Direksi	76	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota
13	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
17	Komposisi Dewan Komisaris		
18	Profil Dewan Komisaris		
22	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

Direksi, Anggota Dewan Komisaris,
dan Anggota Dewan Pengawas
Syariah, dengan Anggota Direksi
Lain, Anggota Dewan Komisaris
Lain, Anggota Dewan Pengawas
Syariah Lain, dan/atau Pemegang
Saham PT Jamkrida Jabar

79 Pengungkapan Hal Penting Lainnya

**83 PENILAIAN SECARA MANDIRI
ATAS PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK**

84 RENCANA TINDAK LANJUT

PENDAHULUAN INTRODUCTION

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten dan berkelanjutan di dalam Perusahaan. Implementasi GCG merupakan pondasi penting untuk menggapai visi Perusahaan yaitu *"menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah"*.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan PT Jamkrida Jabar mengimplementasikan GCG adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan PT Jamkrida Jabar dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

GCG IMPLEMENTATION COMMITMENT

Good Corporate Governance (GCG) is a system designed to direct professional company management based on transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and equality principles.

PT Jamkrida Jabar (the "Company") has a strong commitment to consistently and continuously implementing GCG within the Company. GCG implementation is an important foundation for achieving the Company's vision: *"to become a Trusted Credit Guarantee Company that Contributes to Regional Economic Growth"*.

PURPOSE OF GCG IMPLEMENTATION

The objectives of PT Jamkrida Jabar in implementing GCG are:

1. As a guideline for the Board of Commissioners and the Board of Sharia Supervisory in carrying out supervision and providing advice to the Board of Directors in managing the Company.
2. As a guideline for the Board of Directors to carry out the Company's daily activities based on high moral values regards to articles of association, business ethics, and applicable laws and regulations.
3. As a guideline for the management and employees of PT Jamkrida Jabar in carrying out their daily activities and duties by GCG principles.

DASAR PENERAPAN GCG

Implementasi GCG di PT Jamkrida Jabar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Yang Baik Provinsi Jawa Barat.

BASE OF GCG IMPLEMENTATION

GCG implementation at PT Jamkrida Jabar refers to applicable laws and regulations such as:

1. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority Regulation Number: 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
3. Circular of the Financial Services Authority Number: 54/SEOJK.05/2017 concerning Reports on Implementing Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
4. Regulation of the Governor of West Java Number: 105 of 2020 concerning Regulations for implementing Good Governance of Regional Owned Enterprises in West Java Province.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Jamkrida Jabar bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien, serta menumbuhkan nilai bagi pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perseroan telah menanamkan dalam budaya serta perilaku bisnis Perseroan, hal ini tercermin pada kewajaran dalam bertransaksi usaha, keterbukaan, dan perilaku manajemen dalam menjalankan bisnis penjaminan.

Perseroan telah membangun landasan maupun kerangka acuan untuk menunjang GCG. Hal ini tertuang dalam:

1. Visi dan Misi Perseroan yang memberikan arah dan strategi pengembangan usaha secara jelas.
2. Struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggungjawaban secara jelas menyangkut unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yang mencakup Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Satuan Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko dan Klaim, serta Sekretaris Perusahaan.

GCG STRUCTURE AND MECHANISM

The application of GCG principles at PT Jamkrida Jabar aims to obtain a good, effective, and efficient result and to grow value for shareholders and stakeholders.

The Company has instilled in the Company's culture and business behavior, reflected in fairness in business transactions, openness, and management behavior in carrying out the guaranteed business.

The Company has built a foundation and framework of reference to support GCG, contained inside:

1. Vision and Mission of the Company provide clear directions and business development strategies.
2. An organizational structure that clearly describes lines of responsibility regarding the main elements of corporate governance implementation encompass the Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, Internal Oversight Unit, Risk and Claims Management Division, and the Corporate Secretary.

3. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Penerapan GCG bagi Perseroan tidak hanya keharusan dalam rangka memenuhi regulasi tetapi merupakan elemen fundamental yang mengacu pada *international best practices* untuk keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan GCG yang komprehensif di beberapa industri dan perusahaan terbukti telah memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan nilai perusahaan (*value creation*) dan telah memberikan manfaat nyata bagi masing-masing industri dan Perseroan, antara lain meningkatnya daya saing dan kinerja perusahaan serta kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik investor lokal maupun luar negeri.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan pegawai Jamkrida Jabar untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis penjaminan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

3. Supervisory function of the Board of Commissioners.

GCG implementation for the Company is not only a necessity to comply with regulations but a fundamental element that refers to international best practices for healthy and sustainable business continuity in the long term. The implementation of comprehensive GCG in several industries and companies has been proven to have a good contribution to increasing corporate value (value creation) and provided real benefits for each industry and the Company, including increased competitiveness and company performance, and the trust of stakeholders, both local and foreign investors.

To achieve this, of course, a joint commitment from all levels of the Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Board of Directors, and employees of Jamkrida Jabar is needed to implement GCG principles as the basis for carrying out guarantee business activities, which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality.

The Company believes that consistent implementation of GCG principles and practices will provide benefits, both for the Company and its Stakeholders, namely by:

1. Improving management's seriousness in applying the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and prudence in managing the Company.
2. Improving the Company's performance, efficiency, management, and services to Stakeholders.
3. Protecting the Company from external intervention and lawsuits
4. Avoid conflicts of interest between the Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Directors, Shareholders, and the Company.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2022

PT Jamkrida Jabar menyadari pentingnya GCG dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi para Pemangku Kepentingan. Dalam mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan, perusahaan berusaha menjalankan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait kelangsungan bisnis dan operasional Perusahaan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan perusahaan. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler.

PT Jamkrida Jabar realizes the importance of GCG in supporting business growth and providing added value to Stakeholders. In implementing GCG comprehensively and continuously, the company tries to carry out GCG principles and practices based on the applicable laws and regulations.

According to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU PT"), a Limited Liability Company has 3 (three) key organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in the Company and holds all authority that is not delegated to the Board of Commissioners and Directors. The GMS is also a forum for shareholders to make important decisions related to the continuity of the Company's business and operations.

Decisions made at the GMS based on the interests of the company. Shareholders do not intervene in the duties, functions and powers of the Board of Commissioners and Board of Directors to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations. Resolutions made at the GMS fairly and transparently.

Throughout 2022, the Company has held 1 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), 1 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), and 1 Circular General Meeting of Shareholders.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 diselenggarakan pada tanggal 03 Juni 2022 bertempat di InterContinental Hotel Dago Pakar Bandung yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Keputusan Agenda Kedua
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Pemegang Saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Agenda Ketiga
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Keputusan Agenda Keempat
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Perubahan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengubah Pajak Penghasilan atas gaji/honorarium dan tunjangan ditanggung oleh Perseroan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022.

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2021 held on June 3, 2022, at the InterContinental Hotel Dago Pakar Bandung decided the following matters:

1. First Agenda Decision
Shareholders approve and ratify the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year..
2. Second Agenda Decision
Shareholders approved and ratified the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2021 Fiscal Year audited by Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Public Accounting Firm with Unqualified Opinion.
Shareholders provide discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2021 Fiscal Year, as long as these actions are not criminal acts and do not conflict with the valid laws and regulations.
3. Third Agenda Decision
Shareholders approve and ratify the proposed Use of the Company's Net Profits for the 2021 Fiscal Year.
4. Fourth Agenda Decision
Shareholders approve and ratify the Changes in the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company by changing the Income Tax on salaries/honorarium and benefits borne by the Company as of January 1, 2022.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

5. Keputusan Agenda Kelima
Pemegang Saham menyetujui Penggunaan Jasa Akuntan Publik Aryo Wibisono dan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

5. Fifth Agenda Decision
The Shareholders approved the Use of the Services of Public Accountant Aryo Wibisono and Hertanto, Grace, Karunawan Public Accountant Office for auditing the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2022 will end on December 31, 2022.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 tersebut dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn.

The decisions at the Annual General Meeting of Shareholders for the 2021 Fiscal Year stated in Deed No. 11 dated June 3, 2022, made before Notary Yanti Yulianti, S.H., M.Kn.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 28 November 2022 bertempat di Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 28, 2022, at the Holiday Inn Pasteur Hotel Bandung, decided the following matters:

1. Keputusan Agenda Pertama
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2023.
2. Keputusan Agenda Kedua
 - a. Pemegang Saham menyetujui Usulan Penetapan Dampak Penerapan PSAK 71-72 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 sebagai Cadangan Umum sebagai Koreksi Audit pada akun Cadangan Umum senilai Rp30.529.670.143,- yang belum ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2021.
 - b. Pemegang Saham menyetujui Usulan mengubah besaran Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021 untuk alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi sebesar 5% atau senilai Rp529.258.285,-.

1. First Agenda Decision
Shareholders approve and ratify the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year.
2. Second Agenda Decision
 - a. Shareholders approve the Proposed Determination of the Impact of the Application of PSAK 71-72 on the 2020 Financial Statements as a General Reserve as an Audit Correction on the General Reserve account in the amount of IDR 30,529,670,143,- which has not determined at the 2021 General Meeting of Shareholders.
 - b. Shareholders agreed to the proposal to change the amount of use of net profit for the 2021 fiscal year for the allocation of social and environmental responsibility to 5% or a value of IDR 529,258,285,-.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dituangkan dalam Akta No. 23 tanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn.

The decisions at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are stated in Deed No. 23 dated November 28, 2022, made before Notary Yanti Yulianti, S.H., M.Kn.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SINGKULER

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Sirkuler) sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan Yanti Rachmawati selaku Direktur Keuangan Perseroan.
- b. Pemegang Saham memutuskan dan menyetujui atas Pengangkatan dan Penetapan Yanti Rachmawati selaku Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak dinyatakan lulus dari uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 22 Februari 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga selanjutnya susunan pengurus Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CIRCULAR

Based on Deed No. 11 April 5, 2022, made before Notary Yanti Yulianti, S.H., M.Kn. regarding the Statement of Resolutions of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of the Company (Circular) as follows:

- a. The Shareholders decided and agreed to dismiss Yanti Rachmawati as the Company's Director of Finance.
- b. The Shareholders decide and approve the Appointment and Appointment of Yanti Rachmawati as the Main Director of the Company with a term of 5 (five) years from the time she passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority until February 22, 2027, without prejudice to the rights of the General Meeting Shareholders to stop it at any time. So that the subsequent composition of the Company's management is as follows:

No. No.	Jabatan Position	Nama Name
1	Komisaris Utama President Commissioner	Muhammad Taufiq Budi Santoso
2	Komisaris Independen Independent Commissioner	Dini Rosdini
3	Direktur Utama President Director	Yanti Rachmawati
4	Direktur Operasional Operational Director	Agus Subrata

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TRANSPARENCY IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

KOMPOSISI DIREKSI

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Kepatutan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarga- negara Citizenship	Domisili Domicile
1	Yanti Rachmawati	Direktur Utama President Director	22-02-2022 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 952/NB.11/2022 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 952/NB.11/2022	Akta No. 11 tanggal 05-04-2022 Masa Jabatan 5 tahun s.d. 22-02-2027 Deed No. 11 date 05-04-2022 Term of Office 5 years until 22-02-2027	Indonesia	Indonesia
2	Agus Subrata	Direktur Operasional Operational Director	08-07-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 432/NB.11/2021 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 432/NB.11/2021	Akta No. 74 tanggal 13-09-2021 Masa Jabatan 5 tahun s.d. 31-08-2026 Deed No. 74 date 13-09-2021 Term of Office 5 years until 31-08-2026	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan
susunan Direksi.

During 2022 there was no change in the
composition of the Board of Directors.

PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTOR PROFILE



YANTI RACHMAWATI

Direktur Keuangan
President Director

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 05 November 1974.

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bandung, on November 05, 1974.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2012.
- S1 Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000.
- D3 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1995.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 05 April 2022 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrida Jabar Nomor: 11, tanggal 05 April 2022.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as President Director of PT Jamkrida Jabar for the first time based on Shareholders' Resolution dated April 05, 2022, by the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders of PT Jamkrida Jabar Number: 11, April 5, 2022.

PERIODE MENJABAT

22 Februari 2022 (lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan OJK) - 22 Februari 2027.

PERIOD OF SERVICE

February 22, 2022 (passed OJK fit and proper test) - February 22, 2027.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar (Sep 2021 – Feb 2022).
- Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah Perum Jamkrindo (2018-2021).
- Pemimpin Kantor Wilayah Bandung (Wilayah Kerja Jawa Barat) Perum Jamkrindo (2016-2018).
- Pemimpin Kantor Cabang Bandung Perum Jamkrindo (2013-2016).
- Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Kantor Cabang Bandung Perum Jamkrindo (2008-2013).

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Master of Management at Padjadjaran University in 2012.
- Bachelor of Management at the University of Indonesia in 2000.
- Associate Degree in Accounting from Padjadjaran University in 1995.

EMPLOYMENT HISTORY

- Finance Director of PT Jamkrida Jabar (Sep 2021 – Feb 2022).
- Head of Perum Jamkrindo Sharia Guarantee Business Desk (2018-2021).
- Head of Bandung Regional Office (West Java Working Area) Perum Jamkrindo (2016-2018).
- Head of Bandung Branch Office of Perum Jamkrindo (2013-2016).
- Head of Administration and Finance Section of the Bandung Branch Office of Perum Jamkrindo (2008-2013).

HUBUNGAN AFILIASI

Yanti Rachmawati tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Yanti Rachmawati has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Yanti Rachmawati tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Yanti Rachmawati does not own the Company's shares.



AGUS SUBRATA

Direktur Operasional
Operational Director

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 01 Juni 1968.

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bandung, on June 1, 1968.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul tahun 2014.
- S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 1993.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Master of Management at Esa Unggul University in 2014.
- Bachelor of Government Science from Padjadjaran University in 1993.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 13 September 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) PT Jamkrida Jabar Nomor: 74 tanggal 13 September 2021.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as the Finance Director of PT Jamkrida Jabar for the first time based on the EGMS Decision on September 13, 2021, according to the PT Jamkrida Jabar Shareholders Decision Statement Deed (Sirkuler) Number: 74 of September 13, 2021.

PERIODE MENJABAT

13 September 2021 - 31 Agustus 2026.

PERIOD OF SERVICE

September 13, 2021 - August 31, 2026.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (2020-sekarang).
- Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (2020-2021).
- Komisaris Independen PT Sahabat Insurance d/h PT Bess Central Insurance (2018-2021).
- Direktur Utama PT Berdikari Logistik Indonesia (2016-2017).
- Asisten Direktur Teknik dan R&D PT Berdikari Logistik Indonesia (2013-2015).
- Direktur PT Tala Re International Reinsurance Broker Direktur (2010-2013).

EMPLOYMENT HISTORY

- Lecturer at the Trisakti Insurance Management College (2020- present).
- Vice Chair II at the Trisakti Insurance Management College (2020-2021).

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2022

- Independent Commissioner of PT Sahabat Insurance formerly PT Bess Central Insurance (2018-2021).
- President Director of PT Berdikari Logistik Indonesia (2016-2017).
- Assistant to the Technical and R&D Director of PT Berdikari Logistik Indonesia (2013-2015).
- Director of PT Tala Re International Reinsurance Broker Director (2010-2013).

HUBUNGAN AFILIASI

Agus Subrata tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Agus Subrata has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Agus Subrata tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Agus Subrata does not own the Company's shares.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham.
- c. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
- g. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional lembaga keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a company organ that is fully responsible for managing the company for the interests and objectives of the company by the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors has collective duties and responsibilities in managing the company.

All members of the Company's Board of Directors have met the following criteria:

- a. The assignment of members of the Board of Directors is by the GMS.
- b. Has complied with the fit & proper test provisions from the Financial Services Authority, the Limited Liability Company Law, and related GCG provisions and has obtained approval from the Financial Services Authority and Shareholders.
- c. All members of the Board of Directors have adequate integrity, competence, and financial reputation.
- d. Members of the Board of Directors do not take and receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS.
- e. All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia.
- f. All members of the Board of Directors are Indonesian citizens.
- g. All members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experience in financial institution operations.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors is the organ of the Company that is responsible for managing the Company. The Board of Directors must, in good faith and full responsibility for the interests of the Company, manage the business and affairs of the Company while taking into account the balance of interests of all parties with an interest

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan

in the Company's activities. The Board of Directors acts carefully, prudently, and by considering various important aspects that are relevant in carrying out their duties. The Board of Directors uses the authority they have for the benefit of the Company only.

The Board of Directors has the following duties and authorities:

1. The main duties of the Board of Directors are:
 - a) Lead and manage the Company by the aims and objectives of the Company and always strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company;
 - b) Mastering, maintaining, and managing the Company's assets.
2. The Board of Directors is fully responsible for carrying out their duties for company interests in achieving its aims and objectives.
3. Each member of the Board of Directors must have good intention and full responsibility to carry out their duties for the interests and business of the Company by observing the applicable laws and regulations
4. In carrying out their duties, the actions of the Board of Directors below must inform or obtain written approval from the Board of Commissioners, namely:
 - a. Every change in the participation of the Company's shares in other companies in the form of transfer of shares, reduction of shares, or increase of shares. The Board of Directors must obtain the approval of the Main Commissioner and a member of the Board of Commissioners. Or if the Main Commissioner is absent, then the Board of Directors action must obtain approval from 2 (two) members of the Company's Commissioners.
 - b. Legal actions to transfer, relinquish rights or make debt guarantees for all or part of the Company's assets in 1

- Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

(one) financial year, either in one transaction or several transactions that are independent or related or related to each other, must obtain the approval of the GMS attended or represented by the shareholders. Shareholders who own at least $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total number of shares with valid voting rights and decisions approved by at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total number of votes legally cast at the Meeting.

- c. Legal actions to transfer or make as collateral for a debt or release the rights to the Company's assets above, must also be announced in 2 (two) daily newspapers in the Indonesian language circulating at the domicile of the Company no later than 30 (thirty) days from the date the act has committed the law.
5. The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company provided that all actions of the President Director are approved at the Board of Directors Meeting. If the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party, then another member of the Board of Directors has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
6. The Board of Directors for certain actions on their responsibility, also has the right to appoint one or more representatives or proxies, by giving him or them the power for certain actions as stipulated in the Power of Attorney.
The division of duties and authorities for each member of the Board of Directors is determined by the GMS and this authority can be delegated by the GMS to the Board of Commissioners.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

Frekuensi Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa "Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan".

Selama tahun 2022, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Frequency of Board of Directors Meetings held in 1 (one) year

By POJK No.3/POJK.05/2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 17 that "The Board of Directors of Guarantee Institutions required to hold regular meetings of the Board of Directors at least 1 (one) time in 1 (one) month".

During 2022, the Board of Directors has held 27 (twenty-seven) meetings with the following attendance:

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Yanti Rachmawati	22	3	93%
2	Agus Subrata	20	3	85%

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Kepatutan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarga- negaraan Citizenship	Domisili Domicile
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Komisaris Utama President Commissioner	03-12-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 801/NB.11/2021 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 801/NB.11/2021	Akta No. 07 tanggal 21-12-2021 Masa Jabatan 4 tahun Deed No. 07 date 21-12-2021 Term of Office 4 years	Indonesia	Indonesia
2	Dini Rosdini	Komisaris Independen Independent Commissioner	17-09-2019 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 532/NB.11/2019 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 532/NB.11/2019	Akta No. 39 Tanggal 26-11-2019 Masa Jabatan 4 Tahun Deed No. 39 date 13-09-2021 Term of Office 4 years	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris.

During 2022 there was no change in the composition of the Board of Commissioners.

PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER PROFILE



MUHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Komisaris Utama
President Commissioner

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Probolinggo, 21 April 1967.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Probolinggo, on April 21, 1967.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Kebijakan Publik di Universitas Padjadjaran tahun 2012.
- S2 Public Administration di University of Birmingham tahun 1995.
- S1 Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung tahun 1990.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 21 Desember 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPSLB PT Jamkrida Jabar Nomor: 07, tanggal 21 Desember 2021.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as President Commissioner of PT Jamkrida Jabar for the first time based on the GMS Decision on December 21, 2021, according to the Deed of Statement of Resolutions of Shareholders outside the EGMS of PT Jamkrida Jabar Number: 07, December 21, 2021.

PERIODE MENJABAT

21 Desember 2021 - 21 Desember 2025.

PERIOD OF SERVICE

December 21, 2021 - December 21, 2025.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat (2020-sekarang).
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (2019-2020).
- Penjabat Bupati Purwakarta (2018).
- Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (2018).
- Kepala Biro Pemerintahan Dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Barat (2016-2017).

EMPLOYMENT HISTORY

- Assistant for the Economy and Development of the Regional Secretariat of West Java Province (2020-present).
- Head of the Regional Development Planning Agency of West Java Province (2019-2020).

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2022

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctor of Public Policy at Padjadjaran University in 2012.
- Master of Public Administration at the University of Birmingham in 1995.
- Bachelor of Engineering Planology at the Bandung Institute of Technology in 1990.

- Acting Regent of Purwakarta (2018).
- Head of the Regional Library and Archives Service of West Java Province (2018).
- Head of Government and Cooperation Bureau of Regional Secretariat of West Java Province (2016-2017).

HUBUNGAN AFILIASI

Muhammad Taufiq Budi Santoso tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Muhammad Taufiq Budi Santoso has no affiliation with either the other members of the Board of Commissioners, or the Board of Sharia Supervisory, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Muhammad Taufiq Budi Santoso tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Muhammad Taufiq Budi Santoso does not own the Company's shares.



DINI ROSDINI

Komisaris Independen
Independent Commissioner

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 13 April 1977.

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bandung, on 13 April 1977.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia tahun 2015.
- S2 Magister Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2005.
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2000.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctor of Accounting Science at the University of Indonesia in 2015.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 26 November 2019 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar Nomor: 39, tanggal 26 November 2019.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Independent Commissioner of PT Jamkrida Jabar for the first time based on the Resolution of the EGMS on 26 November 2019 in accordance with the Deed of Minutes of the EGMS of PT Jamkrida Jabar Number: 39 dated 26 November 2019.

PERIODE MENJABAT

26 November 2019 - 26 November 2023.

PERIOD OF SERVICE

November 26, 2019 - November 26, 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (2001-sekarang).
- Anggota Komite Audit di PT Mitrabara Adiperdana, Tbk. (2018-sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2016-sekarang).
- Anggota Komite Audit di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2014-2016).
- Sekretaris Dewan Komisaris di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2013-2014).

EMPLOYMENT HISTORY

- Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (2001-present).
- Member of the Audit Committee at PT Mitrabara Adiperdana, Tbk. (2018-present).

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2022

- Master of Accounting at Padjadjaran University in 2005.
- Bachelor of Accounting at Padjadjaran University in 2000.
- Member of the Risk Monitoring Committee at PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2016-present).
- Member of the Audit Committee at PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2014-2016).
- Secretary to the Board of Commissioners at PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2013-2014).

HUBUNGAN AFILIASI

Dini Rosdini tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Dini Rosdini has no affiliation with either the other members of the Board of Commissioners, or the Board of Sharia Supervisory, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Dini Rosdini tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Dini Rosdini does not own the Company's shares.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a company organ that has collective duties and responsibilities for supervising and providing direction to the Board of Directors and ensuring that the company implements GCG at all levels or levels of the organization.

All members of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar have met the following criteria:

- a. The assignment of members of the Board of Commissioners is carried out by the GMS.
- b. Has complied with the fit and proper test provisions from the Financial Services Authority, the Limited Liability Company Law, and related GCG provisions, and has obtained approval from the Financial Services Authority.
- c. All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competence, and financial reputation.
- d. All members of the Board of Commissioners do not take and or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS.
- e. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia.
- f. All members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The duties of the Board of Commissioners are:

1. Supervise the Company's management policies carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including the Company's development plan, the Company's work plan and annual budget, implementation of the provisions of the Articles of

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2022

serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam

Association and GMS decisions as well as the applicable laws and regulations.

2. Carry out duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, GMS Decision,s and applicable laws and regulations.
3. Carry out the interests of the Company by taking into account the interests of the Shareholders and being responsible to the GMS.
4. Research and review the Quarterly, Semester and Annual Reports prepared by the Board of Directors and sign the report. If the Commissioner refuses to sign the report, then the refusal and the reasons must be stated in writing.
5. Following the development of the Company's activities.
6. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues considered important for the management of the Company.
7. Report immediately to the GMS if there are signs of a decline in the Company's performance.

For the supervisory and advisory functions as referred to above to be carried out effectively, the Board of Commissioners also has the following duties:

1. Provide opinions and advice to management regarding the determination of the vision, mission, culture, and values of the Company.
2. Conduct studies and provide opinions on business strategies that need to be implemented by the Company.
3. Conducting assessments, and providing opinions and advice on human resource management systems.
4. Conduct assessments, and provide opinions and advice on risk control systems.
5. Conduct an assessment and provide opinions and advice on the Draft Business

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- | | |
|---|---|
| <p>RKAP Tahunan.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham. | <p>Plan and its elaboration in the Annual Work Plan and Budget.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Provide approval for strategic business decisions which according to laws and regulations and GMS decisions must be approved by the Board of Commissioners.7. Provide an assessment of the reports of internal and external auditors and provide advice to management on matters that need to be followed up.8. Approve the Business Plan (RKAP) submitted by the Directors of the Company after conducting inspections and discussions with the Directors.9. Periodically supervise the implementation of the Business Plan and provide opinion/approval on changes to the Business Plan by applicable regulations.10. Submit monitoring reports to Shareholders. |
|---|---|

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners divides tasks among each member of the Board of Commissioners to specifically supervise certain areas, which are set forth both in the Board of Commissioners Decree and in the resolutions of the Board of Commissioners Coordination Meeting.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

The frequency of the Board of Commissioners' meetings held in 1 (one) year

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa "Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan".

By POJK No.3/POJK.05/2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 31 that "The Board of Commissioners of Guarantee Institutions required to hold a Board of Commissioners meeting at least 1 (one) time in 3 (three) months".

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

During 2022, the Board of Commissioners has held 27 (twenty-seven) meetings with the following attendance:

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

No. <i>No.</i>	Nama <i>Name</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendance</i>		% Kehadiran <i>Attendance</i>
		Luring <i>Offline</i>	Daring <i>Online</i>	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	21	3	89%
2	Dini Rosdini	24	3	100%

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

COMPOSITION OF THE BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Kepatutan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarga- negara Citizenship	Domisili Domicile
1	Zaini Abdul Malik	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chair of The Board of Sharia Supervisory	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-488/ NB.1/2015 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-488/ NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014 Deed No. 38 date 28-11-2014	Indonesia	Indonesia
2	Khozin Abu Faqih	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of The Board of Sharia Supervisory	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-488/ NB.1/2015 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-488/ NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014 Deed No. 38 date 28-11-2014	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan DPS.

During 2022 there were no changes to the composition of the Board of Sharia Supervisory.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH BOARD OF SHARIA SUPERVISORY PROFILE



RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar Nomor: 38, tanggal 28 November 2014.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Chairman of the Board of Sharia Supervisory of PT Jamkrida Jabar Sharia Business Unit for the first time based on the EGMS Decision on November 28, 2014, according to the Deed of PT Jamkrida Jabar EGMS Minutes Number: 38 dated November 28, 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

PERIOD OF SERVICE

Since November 28, 2014.

ZAINI ABDUL MALIK

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Board of Sharia
Supervisory

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 31 Januari 1975.

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bandung, on January 31, 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2022.
- S2 Kajian Islam/Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) sampai dengan sekarang.
- Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW. Muhammadiyah Jawa Barat (Periode 2010-2015)
- Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (2002-2003).
- Penulis karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

EMPLOYMENT HISTORY

- Lecturer at the Faculty of Syari'ah at the Islamic University of Bandung (UNISBA) until now.
- Member of the PW Tarjih and Tajdid Council. Muhammadiyah West Java (Period 2010-2015)

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2022

- S1 pada Fakultas Syariah/ Muamalah di Institut Agama Islam Negeri/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctoral degree at Sunan Gunung Djati State Islamic University in 2022.
- Master of Islamic Studies/Islamic Economics at State Islamic University/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 2008.
- Bachelor of Sharia/Muamalah Faculty at the State Islamic Institute/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung in 1999.

- Chairman of the Jakarta Syari'ah Economic Forum (2002-2003).
- Author of scientific works on Islamic Economics/Sharia Economics.

HUBUNGAN AFILIASI

Zaini Abdul Malik tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Zaini Abdul Malik has no affiliation with other members of the Board of Sharia Supervisory, nor the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Zaini Abdul Malik tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Zaini Abdul Malik does not own the Company's shares.



KHOZIN ABU FAQIH

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Board of Sharia Supervisory

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Gresik, 08 September 1969.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Gresik, on September 08, 1969.

RIWAYAT PENDIDIKAN
Menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA/Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh Cabang Jakarta) tahun 1996.

EDUCATIONAL BACKGROUND
Graduated from Sharia Faculty at the Institute of Islamic and Arabic Sciences (LIPIA/Imam Muhammad bin Saud Riyadh Islamic University Jakarta Branch) in 1996.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 38 tanggal 28 November 2014.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Member of the Board of Sharia Supervisory of PT Jamkrida Jabar Sharia Business Unit for the first time based on the EGMS Decision on November 28, 2014, according to the Deed of PT Jamkrida Jabar EGMS Minutes Number: 38 dated November 28, 2014.

PERIODE MENJABAT
Sejak 28 November 2014.

PERIOD OF SERVICE
Since November 28, 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Pimpinan Pesantren Qur'an Atarbiyah Pusat Layanan Pendidikan (PULPEN).
- Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah (2013-sekarang).
- Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010-2012).
- Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung tahun (2000-2009).
- Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994-1996).
- Penulis dan penerjemah buku-buku Islam

EMPLOYMENT HISTORY

- Leaders of the Pesantren Qur'an Atarbiyah Education Service Center (PULPEN).
- Caretaker of Al-Ibda' Innovative Islamic Boarding School and Al-Ilham Islamic Boarding School/Sharia Banking Vocational School (2013-present).

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2022

- MQFM Islamic Insights Study Filler (2010-2012).
- Lecturer at Ma'had Al-Imarat Bandung (2000-2009).
- Lecturer in Ma'had Salahuddin Bogor (1994-1996).
- Author and translator of Islamic books.

HUBUNGAN AFILIASI

Khozin Abu Faqih tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Khozin Abu Faqih has no affiliation with either the other Members of the Board of Sharia Supervisory or the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Khozin Abu Faqih tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Khozin Abu Faqih does not own the Company's shares.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan memegang peranan penting bagi Perseroan sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - b. Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan;
 - c. Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan.
3. Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

The Board of Sharia Supervisory is an independent body recommended by the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and plays an important role for the Company as a supervisor for the application of Sharia principles in every operational activity of the Sharia Business Unit.

Duties and Responsibilities of the Board of Sharia Supervisory

Duties and authorities of the Board of Sharia Supervisory:

1. The Board of Sharia Supervisory has the duty and authority to provide advice and suggestions to the Board of Directors, supervise the Sharia aspects of the operational activities of the Company's Sharia Business Unit, as well as act as a representative of the Company's Sharia Business Unit at the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council.
2. The implementation of supervisory duties and providing advice and suggestions carried out by the Board of Sharia Supervisory as referred to above is carried out on:
 - a. Sharia Guarantee Activities;
 - b. Sharia Guarantee Contract marketed by the Company's Sharia Business Unit;
 - c. Sharia Guarantee marketing practice carried out by the Company's Sharia Business Unit.
3. The Board of Sharia Supervisory is entitled to obtain complete and timely information from the Board of Directors regarding the Company's Sharia Business Units.

If the Board of Sharia Supervisory assesses that there are policies or actions of members of the Board of Directors related to the matters referred to in paragraph 2 that are not by Sharia Principles, the Board of Sharia Supervisory is

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

obliged to ask for an explanation from members of the Board of Directors regarding policies or actions of members of the Board of Directors that are not by the Principles Sharia.

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Frequency of meeting of the Board of Sharia Supervisory held in 1 (one) year

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun". Selama tahun 2022 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 5 (lima) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

By POJK No.3/POJK.05/2017, regarding Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 40 that "BSS is required to hold BSS meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year". During 2022, 5 (five) BSS meetings were held, with the following attendance:

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Zaini Abdul Malik	5	-	100%
2	Khozin Abu Faqih	5	-	100%

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMPANY COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 Tentang Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Dewan Komisaris disebutkan bahwa: Komite Perseroan di bawah Dewan Komisaris terdiri atas:

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number: KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 concerning Company Committees Under the Board of Commissioners, Article 2 Components of Company Committees under the Board of Commissioners states that:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

The Company's Committees under the Board of Commissioners consist of:

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee; and
3. Risk Monitoring and Corporate Governance Committee.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2022

1. Komite Audit

- a. PT Jamkrida Jabar sebagai Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional wajib membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor: 3/POJK.05/2017/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 29 ayat (1).

- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0001/DEKOM/JJ/I/2020 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Audit, membentuk Komite Audit PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:

- 1) Dini Rosdini (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit.

- 2) Prima Yusi Sari sebagai Anggota Komite Audit.

dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Baik Ketua maupun Anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang akuntansi.

- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam

1. Audit Committee

- a. PT Jamkrida Jabar as a Guarantee Institution that has a national operational area is required to form an Audit Committee as stated in POJK Number: 3/POJK.05/2017/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions Article 29 paragraph (1).

- b. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number: KEP-0001/DEKOM/JJ/I/2020 concerning the Establishment and Appointment of the Audit Committee, form the Audit Committee of PT Jamkrida Jabar and appoint:

- 1) Dini Rosdini (Independent Commissioner) as Chair of the Audit Committee.

- 2) Prima Yusi Sari as a Member of the Audit Committee.

Each term of office commences from January 6, 2020, to December 31, 2023.

Both the Chairman and Members of the Audit Committee have expertise in accounting.

- c. Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities that include at least:

- 1) Assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and implementation of the duties of the internal auditors and external auditors by monitoring and evaluating the planning and

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
- 2) Memberikan usulan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa pelaksanaan audit;
 - 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
 - 4) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
 - 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
 - 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- implementation of audits to assess the adequacy of internal controls include the financial reporting process;
- 2) Provide suggestions for prospective external auditors to the Board of Commissioners to be appointed and determined by the General Meeting of Shareholders, based on independence, the scope of the assignment, and audit fees;
 - 3) Reviewing the financial information that will be released by the Company to the public and or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information;
 - 4) Conduct a review of compliance with laws and regulations;
 - 5) Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the external auditor regarding the services provided;
 - 6) Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
 - 7) Examine complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
 - 8) Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company;
 - 9) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

d. Frekuensi Rapat Komite Audit

d. Frequency of Audit Committee Meetings

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Dini Rosdini	3	7	100%
2	Prima Yusi Sari	3	7	100%

e. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

e. Audit Committee Work Program and Its Realization

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Mengulas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Internal (SPI) 2022 Reviewing the Annual Supervisory Work Program (PKPT) of the Internal Supervisory Unit (SPI)	Terlaksana Done
2	Pemantauan PKPT SPI Triwulanan Quarterly SPI PKPT Monitoring	Terlaksana Done
3	Mengulas Kinerja Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan Reviewing Monthly, Quarterly, Semester, and Annual Financial Performance	Terlaksana Done
4	Penyusunan Program Kerja Komite Audit 2023 Compilation of the 2023 Audit Committee Work Program	Terlaksana Done
5	Pemantauan Proses Audit Eksternal External Audit Process Monitoring	Terlaksana Done
6	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Laporan Keuangan 2021 Follow-up Monitoring of Public Accounting Firm (KAP) Audit Findings on the 2021 Financial Report	Terlaksana Done
7	Pembahasan Hasil Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021 oleh KAP Discussion of the Audit Results of the Company's 2021 Financial Statements by KAP	Terlaksana Done
8	Mengulas RKAP 2023 Reviewing the 2023 Business Plan	Terlaksana Done
9	Mengulas Board Manual Reviewing the Board Manual	Terlaksana Done
11	Mengevaluasi Kinerja KAP dan Memberikan Rekomendasi Pengajuan KAP untuk Audit Laporan Keuangan 2022 Evaluating KAP Performance and Providing KAP Submission Recommendations for the 2022 Financial Report Audit	Terlaksana Done

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

No. No.	Program Kerja <i>Work Program</i>	Realisasi <i>Realization</i>
12	Mengulas Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2022 Reviewing the 2022 Financial Report Prognosis	Terlaksana Done
13	Mengulas Rencana Bisnis Perusahaan Reviewing the Company's Business Plan	Terlaksana Done
14	Melakukan Penilaian Tata Kelola Perusahaan Conduct Corporate Governance/CG Assessment	Terlaksana Done
15	Sesi Berbagi dan Diskusi dengan OJK dan Jamkrida lain Sharing and Discussion with OJK and other Jamkrida	Terlaksana Done

PROFIL KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE PROFILE

DINI ROSDINI

Ketua Komite Audit
Chair of the Audit Committee



PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Master of Management Science at the University of Indonesia in 2000.
- Bachelor of Accounting at Padjadjaran University in 1998.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Audit Committee of PT Jamkrida Jabar from January 6, 2020, to December 31, 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (1999-sekarang).
- Anggota Komite Audit PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2013-2020).
- Anggota Komite Audit PT BUMN Hijau Lestari I (2015-2016).

EMPLOYMENT HISTORY

- Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (1999-present).
- Member of the Audit Committee of PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2013-2020).
- Member of the Audit Committee of PT BUMN Hijau Lestari I (2015-2016).

PRIMA YUSI SARI

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Palembang, 24 Agustus 1975.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Palembang, on August 24, 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000.
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1998.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Selain Komite Audit, Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0010/DEKOM/JJ/VIII/2021 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:
 - 1) Dini Rosdini (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 2) Wa Ode Zusnita Muizu sebagai Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 3) Muji Rohmad sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.
 Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki keahlian di bidang akuntansi.
 Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki keahlian di bidang ilmu manajemen.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

2. Nomination and Remuneration Committee

- a. Apart from the Audit Committee, the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar may form other committees to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.
- b. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number:KEP-0010/DEKOM/JJ/VIII/2021 concerning the Establishment and Appointment of the Nomination and Remuneration Committee, form the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar and appoint:
 - 1) Dini Rosdini (Independent Commissioner) as Chair of the Nomination and Remuneration Committee.
 - 2) Wa Ode Zusnita Muizu as Independent Member of the Nomination and Remuneration Committee.
 - 3) Muji Rohmad as Member of the Nomination and Remuneration Committee.
 with their respective terms of office starting from August, 02, 2020, to December, 31, 2023.
 The Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee have expertise in accounting.
 Independent members of the Nomination and Remuneration Committee have expertise in management.
- c. Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

In carrying out its functions, the Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities that include at least:

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS; b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS; d) Struktur remunerasi; e) Kebijakan atas remunerasi; f) Besaran atas remunerasi. 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS; 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS; 5) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS; 6) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding: <ol style="list-style-type: none"> a) Position composition of members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners, and or BSS; b) Policies and criteria required in the Nomination process; c) Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners, and or BSS; d) Remuneration structure; e) Policy on remuneration; f) Amount of remuneration. 2) Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or Board of Sharia Supervisory based on benchmarks that have been prepared as evaluation material; 3) Assist the Board of Commissioners in assessing target achievement and performance according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS; 4) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity-building programs for members of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS; |
|---|--|

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- 5) Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS to submit to the GMS;
- 6) Evaluate the structure, policies, and amount of remuneration at least 1 (once) time in 1 (one) year.

d. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

d. Frequency of Nomination and Remuneration Committee Meetings

No. <i>No.</i>	Nama <i>Name</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendance</i>		% Kehadiran <i>Attendance</i>
		Luring <i>Offline</i>	Daring <i>Online</i>	
1	Dini Rosdini	0	7	100%
2	Wa Ode Zusnita Muizu	0	7	100%
3	Muji Rohmad	0	7	100%

e. Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Realisasiny

e. Nomination and Remuneration Committee Work Program and Its Realization

No. <i>No.</i>	Program Kerja <i>Work Program</i>	Realisasi <i>Realization</i>
1	Penyusunan Kajian Remunerasi Pengurus <i>Compilation of Management Remuneration Review</i>	Terlaksana <i>Done</i>
2	Penyusunan Kajian Remunerasi Anggota Komite <i>Compilation of Committee Member Remuneration Review</i>	Terlaksana <i>Done</i>
3	Penyusunan Kajian Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris <i>Compilation of the Remuneration Review of the Secretary to the Board of Commissioners</i>	Terlaksana <i>Done</i>
4	Penyusunan Kajian Tantiem 2021 <i>Compilation of 2021 Management Bonus Review</i>	Terlaksana <i>Done</i>
5	Mengulas Usulan SOTK dari Manajemen <i>Reviewing Proposed Organizational Structure and Company Work Procedures from Management</i>	Terlaksana <i>Done</i>
6	Melakukan Review atas Prosedur Operasi Standar (SOP) Perusahaan <i>Reviewing the Company's Standard Operating Procedures (SOP)</i>	Terlaksana <i>Done</i>

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

No. <i>No.</i>	Program Kerja <i>Work Program</i>	Realisasi <i>Realization</i>
7	Penyusunan Tanggapan atas Pencairan Uang Cuti Direktur Periode Tahun 2020 – 2021 Prepare Responses to Disbursement of Director's Leave Money for the 2020 – 2021 Period	Terlaksana Done
8	Mengulas Kinerja SDM dan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Review HR Performance and Monthly, Quarterly, Semester and Annually	Terlaksana Done
9	Penyusunan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Tahun 2023 Compilation of the Nomination and Remuneration Committee Work Program for 2023	Terlaksana Done

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PROFILE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

DINI ROSDINI

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chair of the Nomination and Remuneration
Committee



PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

- S2 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2004.
- S1 Manajemen di Universitas Halu Oleo tahun 2000.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctoral Degree in Management at Padjadjaran University in 2008.
- Master of Management at Padjadjaran University in 2004.
- S1 Management at Halu Oleo University in 2000.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar from August 2, 2020, to December 31, 2023.

WA ODE ZUSNITA MUIZU

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and
Remuneration Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Kendari, 14 Oktober 1977

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Kendari, October 14, 1977

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2008.

RIWAYAT PEKERJAAN

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (s.d. sekarang).

EMPLOYMENT HISTORY

Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (until now).



MUJI ROHMAD

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bantul, 15 Agustus 1970

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bantul, August 15, 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN

D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1998.

EDUCATIONAL BACKGROUND

D4 Accounting at the State College of Accountancy (STAN) in 1998.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar from August 2, 2020, to December 31, 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Kepala Divisi Keuangan dan Umum PT Jamkrida Jabar (2018-sekarang).
- Manajer Umum Keuangan PT Lintas Media Telekomunikasi (2014-2018).
- Kepala Divisi Keuangan, Akunting, & Perpajakan Bosowa Resources Group, PT Bosowa Resources, PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara (2010-2013).
- HMD Consulting (2010).
- Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (2000-2009).

EMPLOYMENT HISTORY

- Head of Finance and General Affairs Division of PT Jamkrida Jabar (2018-present).
- Finance General Manager of PT Lintas Media Telekomunikasi (2014-2018).
- Head of Finance, Accounting & Taxation Division Bosowa Resources Group, PT Bosowa Resources, PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara (2010-2013).
- HMD Consulting (2010).
- Auditor at BPKP Representative Office of South Sulawesi Province (2000-2009)

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

3. Komite Pemantau Risiko

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEPS-0001/DEKOM/JJ/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, membentuk Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:

- 1) Muhammad Taufiq Budi Santoso (Komisaris Utama) sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
- 2) Subarman Basarah sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2026.

- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
- 3) Membantu Dewan Komisaris dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholders* dan pegawai Perseroan untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha perusahaan;
- 4) Mendukung terwujudnya budaya Perusahaan yang berdasarkan prinsip transparansi,

3. Risk Monitoring Committee

- a. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number: KEPS-0001/DEKOM/JJ/III/ 2022 dated March 1 2022 concerning the Formation and Appointment of the Risk Monitoring Committee, formed the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar and appointed:

- 1) Muhammad Taufiq Budi Santoso (President Commissioner) as Chair of the Risk Monitoring Committee.
- 2) Subarman Basarah as Member of the Risk Monitoring Committee.

each term of office commencing from 01 March 2022 to 01 March 2026.

- b. Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

- 1) Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of Company policies;
- 2) Monitor and evaluate the implementation of the duties of the risk management committee and the risk management work unit;
- 3) Assisting the Board of Commissioners in creating a conducive working climate and becoming a means for stakeholders and employees of the Company to report matters that can cause corporate losses, both financial and non-financial, which can damage the image and sustainability of the company's business;
- 4) Supporting the realization of a corporate culture based on the principles of transparency,

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- | | |
|--|--|
| <p>akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan;</p> <p>5) Menerima laporan/pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar. Kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Perseroan;</p> <p>6) Melakukan penelaahan lebih lanjut atas informasi dan laporan dugaan pelanggaran yang diterima;</p> <p>7) Memberikan perlindungan kepada pelapor (<i>whistleblower</i>) antara lain jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor, isi laporan, perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, pemutusan hubungan kerja, penurunan jabatan, pelecehan, diskriminasi, catatan yang merugikan, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan lainnya;</p> <p>8) Memberikan informasi perkembangan pelaporan tindakan pelanggaran hanya kepada Dewan Komisaris/Direksi dan kepada pelapor yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari pelapor yang bersangkutan;</p> <p>9) Memberikan keputusan tindak lanjut laporan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan;</p> <p>10) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait dalam rangka perbaikan system dan</p> | <p>accountability, responsibility, independence and fairness;</p> <p>5) Receiving reports/complaints/ providing information submitted either directly or indirectly in connection with alleged acts that violate laws, regulations/ standards. Code of ethics, and policies, as well as other similar actions in the form of direct threats to the public interest, as well as Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) that occur within the Company;</p> <p>6) Conduct a further review of the information and reports of alleged violations received;</p> <p>7) Protecting the whistleblower, including guarantees for the confidentiality of the complainant's identity, report contents, protection against the possibility of threats, intimidation, punishment, termination of employment, demotion, harassment, discrimination, adverse records, or unpleasant actions other;</p> <p>8) Provide information on the progress of reporting violations only to the Board of Commissioners/Directors and the reporter accompanied by a written request from the reporter concerned;</p> <p>9) Provide decisions on follow-up reports based on sufficient and reliable evidence;</p> <p>10) Provide recommendations to related work units to improve systems and work processes accompanied by supporting documents;</p> <p>11) Reporting the implementation of monitoring the implementation and enforcement of GCG to the</p> |
|--|--|

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- proses kerja disertai dengan dokumen-dokumen pendukung;
- 11) Melakukan pelaporan penyelenggaraan pemantauan penerapan dan penegakan GCG kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 12) Melakukan evaluasi atas efektifitas pedoman whistleblowing system dan penerapannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
 - 13) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 14) Menjaga kerahasiaan dokumen, data informasi Perusahaan.

Board of Commissioners and Directors;

- 12) Evaluate the effectiveness of the whistleblowing system guidelines and their application to the Board of Commissioners and Directors
- 13) Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company;
- 14) Maintain the confidentiality of documents, Company information data.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

c. Frequency of Risk Monitoring Committee Meetings

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	0	7	100%
2	Subarman Basarah	0	7	100%

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

d. Risk Monitoring Committee Work Program and Its Realization

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Pembuatan Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Compilation of Risk Monitoring Committee Work Rules Guidelines	Terlaksana Done
2	Melakukan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Evaluating the Company's Cooperation Agreements in Credit Guarantee	Terlaksana Done
3	Melakukan Evaluasi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Evaluating Monthly, Quarterly, Semester, and Annual Financial and Non-Financial Performance	Terlaksana Done
4	Melakukan Evaluasi SOP Penjaminan/Klaim/Regaransi/Investasi Evaluating the Standard Operating Procedures of Credit Guarantee/Claim/Re-Insurance/Investment	Terlaksana Done

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

No. <i>No.</i>	Program Kerja <i>Work Program</i>	Realisasi <i>Realization</i>
5	Melakukan Evaluasi Profil Risiko per Skim Kredit per Mitra Bisnis secara Triwulanan <i>Evaluating the Risk Profile of Credit Schemes on a Quarterly Basis</i>	Terlaksana Done
6	Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko untuk Tahun 2023 <i>Compilation of the Risk Monitoring Committee Work Program for 2023</i>	Terlaksana Done
7	Sesi Berbagi dan Diskusi dengan OJK dan Jamkrida lain <i>Sharing Session and Discussion with OJK and other Jamkrida</i>	Terlaksana Done

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO PROFILE OF RISK MONITORING COMMITTEE

MUHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chair of the Risk Monitoring Committee



SUBARMAN BASARAH

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Surabaya, 25 Juni 1970

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Surabaya, on June 25, 1970

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Diploma Program in Oracle8i DBA and Software Analyst at Princeton Information Technology Center, Glenside, Pennsylvania, USA in 2003.
- Bachelor of Science in Environmental Engineering at Institut Teknologi Bandung, in 1994.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2026.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar from March 1, 2022, to March 1, 2026.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Maret 2022-sekarang).
- Direktur Marketing dan Pengembangan Usaha PT Abhirama Kresna – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- Direktur PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- General Manager PT Mangkujenang Harmoni Sinergy – Samarinda (Mar 2013 – Sep 2017).
- Staf Ahli Direksi PT Arkon Prima Indonesia (Mar 2013 – Feb 2014).

EMPLOYMENT HISTORY

- Member of the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar (March 2022-present).

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Program Diploma Oracle8i DBA dan Software Analyst di Pusat Teknologi Informasi Princeton, Glenside, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2003.
- S1 Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung tahun 1994.
- Director of Marketing and Business Development of PT Abhirama Kresna – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- Director of PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- General Manager of PT Mangkujenang Harmoni Sinergy – Samarinda (Mar 2013 – Sep 2017).
- Expert Staff to the Board of Directors of PT Arkon Prima Indonesia (Mar 2013 – Feb 2014).

4. Kewenangan Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, dan informasi tentang pegawai, dana, asset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Divisi yang mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), pegawai dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS.
- d. Apabila diperlukan, Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- e. Apabila diperlukan, Komite dapat membentuk tim yang bersifat *ad-hoc* dengan kriteria dan periode pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.

4. Authority of the Company's Committees Under the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Company's Committees Under the Board of Commissioners have the following powers:

- a. Access all documents, records, and information about employees, funds, assets, and resources of the Company related to the implementation of their duties and functions.
- b. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, BSS, Division that manages Human Resources (HR), employees, and other related parties.
- c. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS.
- d. If necessary, the Committee may involve experts and or consultants/independent parties needed to assist in carrying out their duties, by obtaining written approval from the Board of Commissioners.
- e. If necessary, the Committee may form an ad-hoc team with the criteria and implementation period adjusted to the needs and type of work.

**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS
KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DIREKSI**

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan Di Bawah Direksi, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Direksi disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Direksi terdiri atas:

1. Komite Investasi;
2. Komite Penjaminan;
3. Komite Klaim; dan
4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan.

1. Komite Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:

- a. Direktur Utama untuk nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Keuangan dan Umum; dan
- c. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

2. Komite Penjaminan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Penjaminan dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta Sertifikat Penjaminan berikut perubahannya, serta Keputusan Direksi Nomor: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Kafalah dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) serta Sertifikat Kafalah berikut perubahannya.

**COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF
DUTIES OF COMPANY COMMITTEES UNDER
THE DIRECTORS**

Based on the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 concerning Company Committees Under the Board of Directors, Article 2 Components of Company Committees Under the Board of Directors states that:

The Company's Committees under the Board of Directors consist of:

1. Investment Committee;
2. Guarantee Committee;
3. Claims Committee; And
4. Employee Nomination and Remuneration Committee.

1. The Investment Committee consists of at least 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairperson doubles as a member, who is the Director of Finance, as well as other members who may come from:

- a. President Director for an investment value of more than IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah);
- b. Division Heads and/or Section Heads in charge of Finance and General Affairs functions; And
- c. Head of Division and/or Head of Section in charge of the Risk Management function.

2. The Guarantee Committee consists of at least 3 (three) members, with membership requirements as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 concerning Authority to Decide Guarantees and Sign Guarantee Principle Approval Letters (SP3) as well as Guarantee Certificates and their amendments, as well as Directors Decree Number: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 concerning Authority to Decide on Kafalah and Sign Kafalah Principle Approval Letters (SP2K) as well as Kafalah Certificates and their amendments.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

3. Komite Klaim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan anggota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 tentang Wewenang Memutuskan dan Menandatangani Keputusan Klaim Kredit, yaitu:

a. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan:

- 1) Sampai dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk semua jenis kredit, termasuk kredit pola potong gaji, baik kredit pola potong gaji secara langsung maupun melalui Kopkar/Koppeg yang disalurkan oleh Penerima Jaminan (Bank maupun Non Bank).
- 2) Sampai dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kredit konstruksi/pengadaan barang.

Komite Klaim diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim dengan beranggotakan Kepala Divisi Penjaminan dan Kepala Divisi Keuangan & Umum.

b. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim sebagaimana disebutkan pada poin a sampai dengan jumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Keuangan, dengan beranggotakan Direktur Operasional, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.

c. Bahwa Permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan masalah khusus lainnya yang memerlukan keputusan bersama Direksi, maka Komite Klaim diketuai

3. The Claims Committee consists of at least 3 (three) members, with the provisions of members as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 concerning Authority to Decide and Sign Credit Claims Decisions, namely:

a. That the application for a credit claim for each Guaranteed with the number of submissions:

- 1) Up to an amount of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiahs) for all types of credit, including salary deduction credit, both direct salary deduction credit and through Kopkar/Koppeg disbursed by Collateral Recipients (Banks and Non-Banks)).
- 2) Up to an amount of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs) for construction/procurement loans.

The Claims Committee is chaired by the Head of the Risk & Claims Management Division and consists of the Head of the Guarantee Division and the Head of the Finance & General Affairs Division.

b. Whereas the application for a credit claim for each Guaranteed with the number of claims submitted as mentioned in point up to an amount of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs), the Claims Committee is chaired by the Director of Finance, with members consisting of the Director of Operations, Head of Guarantee Division, Head Finance & General Affairs Division, as well as Head of Risk & Claim Management Division.

c. Whereas the application for credit claims for each Guaranteed with a total claim submission of more than IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs) and other special issues that require a joint decision of

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

oleh Direktur Utama, dengan beranggotakan Direksi secara lengkap, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.

the Board of Directors, the Claims Committee is chaired by the Main Director, with full members of the Board of Directors, Head Guarantee Division, Head of Finance & General Affairs Division, and head of Risk & Claim Management Division.

4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direksi;
 - b. Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.

4. The Employee Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairperson also serves as a member, who is the Director of Finance, and other members may come from:
 - a. Directors;
 - b. Head of Division or Head of Section and or Staff in charge of the Human Resources (HR) management function;
 - c. Head of Division or Head of Section who represents each Division in the Company.

5. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab Komite di bawah Direksi

5. Work programs related to the duties and responsibilities of the Committees under the Board of Directors

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung jawab komite lainnya adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 concerning Company Committees under the Board of Directors, the duties and responsibilities of other committees are as follows:

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
 - 2) Menelaah dan memberikan saran kepala Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 3) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- a. The duties and responsibilities of the Investment Committee include:
 - 1) Assisting the Board of Directors in formulating investment policies and supervising the implementation of the investment policies that have been set;
 - 2) Review and provide advice to the head of the Board of Directors regarding potential conflicts of interest in the Company;

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- b. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:
- 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan Analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan;
 - 3) Memberikan keputusan penjaminan;
 - 4) Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur;
 - 5) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:
- 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim;
 - 3) Memberikan keputusan klaim;
 - 4) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 5) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- d. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:
- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:
 - a) Nominasi promosi, mutasi, demosi bagi Karyawan;
- 3) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.
- b. The duties and responsibilities of the Guarantee Committee include:
- 1) Assisting the Board of Directors in formulating guarantee operational policies, supervising and implementing established guarantee operational policies;
 - 2) Conduct feasibility analysis and risk management of each application for guarantee;
 - 3) Provide guarantee decisions;
 - 4) Sign SP3 and SP on behalf of the Guaranteed/Debtor;
 - 5) Review and provide advice to the Board of Directors regarding potential conflicts of interest in the Company;
 - 6) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.
- c. The Claims Committee's duties and responsibilities include:
- 1) Assisting the Board of Directors in formulating claim policies and supervising the implementation of established claim policies;
 - 2) Perform feasibility analysis and risk management of each claim submission;
 - 3) Provide a claim decision;
 - 4) Review and provide advice to the Board of Directors regarding the potential conflict of interest of the Company;
 - 5) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.
- d. The duties and responsibilities of the Employee Nomination and Remuneration Committee include:
- 1) Provide recommendations to the Board of Directors regarding:

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- b) Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau *variable*;
 - c) Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;
 - d) Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.
- 2) Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- a) Promotion nominations, transfers, and demotions for employees;
 - b) Remuneration structure for Employees which includes salaries, incentives, and or fixed and or variable benefits;
 - c) Policy on remuneration for employees;
 - d) Amount of remuneration for employees.
- 2) Assisting the Board of Directors in assessing target achievement and performance by the remuneration received by each employee;
 - 3) Evaluate the structure, policies, and amount of remuneration at least 1 (once) time in 1 (one) a year;
 - 4) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE, INTERNAL AUDITOR, AND EXTERNAL AUDITOR FUNCTIONS

1. Fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama

- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan
Satuan Pengawas Internal

- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

1) Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan:
Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan

1. Compliance function

- a. Member of the Board of Directors in charge of the compliance function

President Director

- b. Work units or employees carrying out the compliance function

Corporate Secretary and
Internal Supervisory Unit

- c. Implementation of compliance with laws and regulations

1) Corporate Secretary:

The intention of official position:
Enforce compliance with industry authority regulations and the provisions of Good Corporate

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Petugas Kepatuhan).

Governance (Compliance
Officer).

Tugas dan Kewenangan:

- a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris.
- c) Menyelenggarakan Rapat Manajemen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- d) Mengikuti perkembangan bisnis inti perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan.
- e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

Duties and Authorities:

- a) Publish the latest information about the Company in various media, both print and electronic
- b) Facilitate the recording and storage of minutes of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners meetings.
- c) Organizing Management Meetings, Board of Directors and Board of Commissioners meetings (Management Meetings) and General Shareholders Meetings.
- d) Follow the development of the company's core business, especially changes to laws and regulations.
- e) Provide advice to the Board of Directors regarding compliance with applicable regulatory provisions.

2) Satuan Pengawas Internal (SPI)

2) Internal Supervisory Unit (ISU)

Tujuan Jabatan:

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

Tugas dan Kewenangan:

- a) Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta

The intention of the official position:

Assisting the Board of Directors in planning, managing, supervising, and controlling operational and financial audit activities as well as SOP preparation activities in the Company within the limits of applicable government standards and regulations to ensure compatibility between implementation and existing standards and or regulations.

Duties and Authorities:

- a) Designing, proposing, implementing, and

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- | | |
|--|--|
| <p>mengevaluasi rencana program/kebijakan SPI dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan.</p> <p>b) Merencanakan dan membuat program audit, menjadwalkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan.</p> <p>c) Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi.</p> <p>d) Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.</p> <p>e) Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya.</p> <p>f) Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.</p> | <p>evaluating SPI program/policy plans to support the achievement of company goals.</p> <p>b) Plan and create an audit program, and schedule audit implementation to ensure compliance with the expected regulations/procedures/efficiency/management control functions.</p> <p>c) Supervise and monitor operational activities, analyze, examine, report, and provide recommendations to ensure compliance with procedures and improve efficiency.</p> <p>d) Supervise and monitor financial activities, analyze, examine, report, and provide recommendations to ensure that the distribution of cash and its use is by procedures and efficiently.</p> <p>e) Coordinate with related departments in preparing standard operating procedures and procedures (SOP); manage and monitor its implementation to ensure the existence and suitability of its implementation.</p> <p>f) Control & monitor the implementation of program audits and report audit findings to management accompanied by recommendations for improvement.</p> <p>g) Formulating, compiling, proposing, and implementing policies, systems, and procedures, as well as SOP Work Unit ISU.</p> <p>h) Carry out and supervise the implementation of GCG in</p> |
|--|--|

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- g) Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP Unit Kerja SPI.
- h) Melaksanakan dan mengawasi penerapan GCG di bidang tugasnya.

their respective fields of work.

a. Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan

Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, *gearing ratio*, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

a. Company Financial Soundness Level

The company has an adequate level of financial soundness, with the parameters of liquidity ratios, gearing ratios, profitability ratios, and good corporate governance self-assessments, as stated in the table below:

No. No.	Jenis Rasio Ratio Type	Tahun 2022 Year 2022
1.	LIKUIDITAS Liquidity	
a.	Current Ratio Current Ratio	415,03%
2.	GEARING RATIO	
a.	Gearing Ratio Produktif Productive Gearing Ratio	6,06 Kali/Times
b.	Total Gearing Ratio Total Gearing Ratio	26,16 Kali/Times
3.	RENTABILITAS Profitability	
a.	Rasio Return on Asset (ROA) Return on Assets (ROA) Ratio	4,43%
b.	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income Ratio (BOPO)	79,42%
c.	Rasio Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa Claims to Compensation Revenue Ratio	60,16%
4.	Penilaian Sendiri Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Self-Assessment	

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

No. No.	Jenis Rasio Ratio Type	Tahun 2022 Year 2022
	Hasil penilaian sendiri tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrda Jabar mendapatkan nilai 90,48 (sembilan puluh koma empat puluh delapan) dengan predikat "Sangat Baik", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin. The results of the self-assessment of good corporate governance PT Jamkrda Jabar scored 90.48 (ninety point forty-eight) with the title "Very Good", by the Financial Services Authority Circular Letter Number 54/SEOJK.05/2017 concerning Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.	

- b. Unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen

- b. Work units or functions that handle and resolve consumer complaints

No. No.	Penanggung Jawab Person Responsible	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi Head of Work Unit/Executor of Functions
1	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manajemen Risiko & Klaim Head of Risk & Claim Management Division
2	Irwan Budhi Setiawan	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
3	Fahmi Jamiul Ulum	Kabag. Unit Usaha Syariah Head of Sharia Business Unit Section

2. Fungsi Auditor Internal (SPI)

2. Internal Auditor Function (ISU)

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

The effectiveness and scope of implementation of the duties of the internal auditors in assessing all aspects and elements of activities.

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit
- 1) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
 - 2) Melaksanakan audit operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas

- a. Scope of audit work
- 1) Examine and assess to ensure that the Company's internal control system is adequate, and functions effectively, efficiently, and economically in achieving the goals and objectives of the Company, ensuring the reliability of financial information and operational information as well as maintaining and protecting the Company's assets.
 - 2) Carry out operational and compliance audits of management activities aimed at assessing the efficiency and

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- | | |
|--|--|
| <p>operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>).</p> <p>4) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing-masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.</p> <p>5) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.</p> <p>6) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.</p> | <p>effectiveness of company operations, reliability of company information and reporting, and compliance with laws and regulations.</p> <p>3) Carry out follow-up audits (special audits) on cases that have indications of fraud.</p> <p>4) Carry out a performance audit on the work plan and program of each work unit and assess its conformity with company goals and assess risk management.</p> <p>5) Carry out special/additional assignments that are relevant to the scope of ISU tasks.</p> <p>6) The scope and frequency of audits conducted by ISU depend on certain situations and conditions such as the results of previous audits, the materiality of the risk level surrounding an activity, the adequacy of internal controls, and the availability of ISU resources.</p> |
| <p>b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal</p> <p>1) SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.</p> <p>2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI.</p> <p>3) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.</p> | <p>b. The structure or position of the internal audit work unit</p> <p>1) ISU is directly under the President Director.</p> <p>2) ISU is led by a Head of SPI.</p> <p>3) The Head of ISU is appointed and dismissed by the President Director.</p> |
| <p>c. Independensi auditor internal</p> <p>1) SPI secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan</p> | <p>c. Internal auditor independence</p> <p>1) ISU organizationally and personally must be independent of the activity being audited so that it can provide impartial and prejudiced opinions and recommendations in the implementation and reporting of the audit. Independence can be achieved through position in the</p> |

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu:

- a) Kepala SPI harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
 - b) SPI tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
 - c) SPI harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - d) SPI dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
- 2) SPI dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
- a) SPI harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan

company and auditor objectivity, namely:

- a) The Head of ISU must be placed in a position directly under the Main Director so that the implementation of the internal audit has the full support of the Board of Directors and the company's work units, without the interference of any party;
 - b) ISU is not allowed to be involved in operational activities which include planning, development, implementation, and reporting of company work units to ensure the credibility of the results of their supervision.
 - c) ISU must be free from the intervention of any party in determining the scope of work, and execution of work, as well as in communicating audit results to the authorities.
 - d) ISU is prohibited from having a sense of fear, loyalty, and ambition that can affect the activities being carried out so that it can affect the responsibilities of the assignment.
- 2) ISU is said to act objectively when it is independent and unbiased and avoids the possibility of a conflict of interest.
- a) ISU must have an objective mental attitude, be independent and avoid possible conflicts of interest in carrying out supervisory duties.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- dalam melakukan tugas pengawasan.
- b) SPI harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait.
- 3) SPI harus menjaga integritas melalui:
 - a) SPI dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - b) SPI harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
 - c) SPI tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
 - d. Uraian tugas satuan kerja audit internal
Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - 1) Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-
- b) ISU must be sure that they can make professional decisions freely, their work results are reliable, trustworthy, and free from outside influence so that they can produce objective reports and can be used by all related parties.
- 3) ISU must be maintain integrity through:
 - a) ISU is prohibited from receiving compensation in any form from employees, clients, or company partners so that it can affect their professional judgment.
 - b) ISU must show an honest and serious mental attitude in carrying out its duties and fulfilling its responsibilities.
 - c) Isu may not knowingly engage in actions or activities that may damage the image.
 - d. Job description of the internal audit work unit
In carrying out its duties, SPI has duties and responsibilities to:
 - 1) Assist the Board of Directors in fulfilling their responsibilities in managing the company, by way of auditing compliance, operations, and performance of all activities of the company's work units in an integrated manner on compliance, completeness, and use of accounting, financial and other controls as well as providing suggestions for improvement

saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan perusahaan.

- 2) Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya GCG, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
- 3) Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
- 4) Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
- 5) Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
- 6) Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
- 7) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
- 8) Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit

towards on achieving the goals and objectives that have been set in each work unit and the company.

- 2) Assist the Board of Directors in efforts to improve the realization of GCG, encourage the effectiveness of the company's internal control system, improve risk management and company performance, and apply business ethics;
- 3) Helping the Board of Directors to pay attention to changes in the industrial environment, business risks that may arise, opportunities for efforts to increase efficiency and effectiveness, and other matters that affect the company's performance;
- 4) Encouraging work units within the Company in increasing the effectiveness of the internal control system and achieving work unit performance targets to achieve the Company's vision, mission, goals, and objectives;
- 5) Provide an assessment of the adequacy and effectiveness of the company's internal control system and risk management of the company's activities;
- 6) Report on important matters relating to weaknesses and opportunities for improvement in the process of controlling the company's financial and operational activities;
- 7) Identify the activities to be audited, evaluate and assess the level of risk of these activities about the audit plan;
- 8) Provide regular reports on the results of the semester, annual and follow-up audits (special audits) as well as the adequacy of audit resources;
- 9) Provide recommendations for improvements to the company's

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit; 9) Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan; 10) Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA).	business processes and internal controls; 10) Monitor the implementation and accuracy of the follow-up implementation of the Audit Report (AR).
e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI Perusahaan belum memiliki Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI yang definitif di tahun 2022.	e. Profile of Head of Internal Audit Unit/ISU The company does not yet have a definitive Head of Internal Audit/ISU Work Unit in 2022.
f. Jumlah pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal/SPI Jumlah pegawai yang berada di bawah Unit Kerja SPI PT Jamkrida Jabar saat ini berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SPI dan staf.	f. Number of employees in the Internal Audit Work Unit/ISU The number of employees under the PT Jamkrida Jabar ISU Work Unit currently amounts to 2 (two) people consisting of the Acting Head of ISU and staff.
g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama. Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.	g. Report on the results of the implementation of internal audit tasks The report on the results of the implementation of the internal audit is submitted directly by the internal audit to the Main Director. The report contains recommendations and corrective actions, as well as responses from related sectors.
3. Fungsi auditor eksternal Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal,	3. The function of the external auditor The effectiveness of the implementation of the external auditor's duties and the compliance of the Guarantee Agency with the provisions, including among others regarding the provision of all accounting

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2022

sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif.

Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
KAP yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c. Penunjukan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d. Penugasan pemeriksaan kepada AP telah memenuhi aspek-aspek:
 - 1) Kapasitas KAP yang ditunjuk;
 - 2) Legalitas perjanjian kerja;
 - 3) Ruang lingkup audit;
 - 4) Standar profesional akuntan publik; dan

records and supporting data needed for the external auditor, so as to enable the external auditor to give his opinion regarding the fairness, compliance, and conformity of the Guarantee Institution's financial statements with the applicable auditing standards .

At the time of the inspection by the External Auditor, good communication and cooperation between the External Auditor and Management had been carried out intensively.

The Board of Directors supports findings related to accounting policies, interpretations of applicable accounting standards, developments in OJK regulations, and others.

The Board of Directors also actively monitors the follow-up of the External Auditor's audit findings so that it is hoped that similar findings will not be repeated in the future.

Implementation of the External Audit Function has been going well, which can be seen from the following:

- a. The company always appoints a Public Accountant (PA) and a Public Accounting Firm (PAF) that are registered with OJK.
- b. Appointment of the same PA and PAF by the Company for no more than 5 (five) consecutive financial years.
The PAF that has audited the Company's financial statements for the last 5 (five) years, can be seen in the table below.
- c. The appointment of PA and PAF has obtained approval and recommendation from the Board of Commissioners.
- d. Assignment of inspection to PA has fulfilled the following aspects:
 - 1) Capacity of appointed PAF;
 - 2) Legality of work agreements;
 - 3) The scope of the audit;
 - 4) Professional standards of public accountants; and
 - 5) Communication between OJK and the appointed PAF.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- 5) Komunikasi antara OJK dengan KAP yang ditunjuk.
- e. AP yang ditunjuk telah:
- 1) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.
 - 2) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- e. The appointed PA has:
- 1) Deliver audit results and management letters to the Company promptly.
 - 2) Able to work independently, and meet the professional standards of public accountants and work agreements as well as the established audit scope.

AP dan KAP yang melakukan audit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar selama 5 (lima) tahun terakhir:

PA and PAF who have audited the financial statements of PT Jamkrida Jabar for the last 5 (five) years:

Tahun <i>Year</i>	Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i>	Nama Akuntan Publik dan Nomor Registrasi OJK <i>Name of Public Accountant and OJK Registration Number</i>	Biaya Auditor Eksternal <i>External Auditor Fee</i> (Rp)
2022	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000,00
2021	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000,00
2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000,00
2019	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA AP.0739 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA AP.0411	82.500.000,00
2018	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA AP.0739 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA AP.0411	82.500.000,00

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA
KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI**

**IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT,
INTERNAL CONTROL SYSTEM, AND
INFORMATION TECHNOLOGY
GOVERNANCE**

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Direksi bertanggung jawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektivitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi
Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi
Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan: identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi.
4. Struktur organisasi sistem informasi
Organisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi PT Jamkrida Jabar terdiri atas:
 - a. Staf SMI sebagai penanggung jawab pengembangan operasional teknologi informasi..
 - b. Staf SMI sebagai penanggung jawab infrastruktur teknologi informasi..

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners
 - a. The Board of Directors is responsible for implementing risk management strategies and policies, internal control systems, and information technology governance and provides reports to the Board of Commissioners.
 - b. The Board of Commissioners oversees the overall level of effectiveness and implementation of policies.
2. Adequacy of policies, procedures, and use of information technology
Risk management policies, procedures, and the use of information technology require the company to comply with the rules and regulations that have been set.
3. Adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling the risks of using information technology
This policy establishes risk management principles and processes which are carried out in stages: risk identification, risk assessment, risk management, and monitoring and evaluation.
4. Information system organizational structure
PT Jamkrida Jabar Information Management System Management Organization consists of:
 - a. IT staff as the person in charge of information technology operational development.
 - b. IT staff as the person in charge of information technology infrastructure.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 2022

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi
Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* Perseroan.
6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara reguler dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.

PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KARYAWAN

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

Pada tahun 2022 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti (khusus Direksi), tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

5. Internal control system for the use of information technology
The internal control system for the use of information technology refers to the SOP for Management Information Systems and the Company's Disaster Recovery Plan Guidelines.
6. Comprehensive internal control system
Compliance with risk policies and guidelines is regularly monitored by the work unit concerned.

IMPLEMENTATION OF REMUNERATION POLICY AND OTHER FACILITIES FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF SHARIA SUPERVISORY, AND EMPLOYEES

1. Disclosure of remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Sharia Supervisory (BSS).
 - a. Remuneration in non-natura forms, including salaries and other fixed income, including benefits, share-based compensation, bonus/incentive, and other forms of remuneration.

In 2022 the Company provides non-natura remuneration to the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, namely in the form of basic salary, position allowances, tax allowances, leave allowances (especially for Directors), holiday allowances, incentives, and bonus originating from the Company's net profit.

- b. Other facilities in kind/non-natura form, namely other non-fixed income, including allowances for housing, transportation, health insurance, and other facilities.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

Pada tahun 2022 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti (khusus Direksi), tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

In 2022 the Company provides non-natura remuneration to the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, namely in the form of basic salary, position allowances, tax allowances, leave allowances (especially for Directors), holiday allowances, incentives, and tantieme originating from the Company's Earnings After Tax.

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.

Pada tahun 2022, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

2 Orang Direksi, 2 Orang Dewan Komisaris, dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah.

2. Disclosure of remuneration packages or policies within 1 (one) year

- a. Packages or remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS determined by the GMS.

In 2022, the GMS determines the remuneration policy in 1 (one) year for the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, including basic salary, position allowances, tax allowances, leave allowances, holiday allowances, incentives, and bonus-originating from the Company's net profit.

- b. Remuneration and other facilities for all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS include at least the number of members of the Board of Directors, the number of members of the Board of Commissioners, the number of members of the BSS and the total number of remuneration policies and other facilities.

2 Directors, 2 Commissioners, and 2 Board of Sharia Supervisory.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

Jumlah yang diterima dalam satu tahun <i>Amount received in one year</i>		Remunerasi *) <i>Remuneration *)</i>	Fasilitas lain dalam bentuk natura**) <i>Other facilities in kind natura form**)</i>
Direksi Board of Directors	Jumlah Direksi Number of Directors	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Millions of Rupiah)	4.476,8	558.5
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Dewan Komisaris Number of Board Commissioners	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Millions of Rupiah)	1.352,7	228.4
Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory	Jumlah DPS Number of BSS	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Millions of Rupiah)	96	21,4

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

Information:

*) Including salary and other fixed income, including benefits, share-based compensation, bonus, and other forms of non-natura remuneration

**) Housing, transportation, health insurance, and so on.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

- c. The number of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS who receive remuneration packages in 1 (one) year are grouped according to income level as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai <i>Total Remuneration per Person in 1 (one) year in cash</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>	Jumlah DPS <i>Number of BSS</i>
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Above IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)	2	0	0
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Above IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) up to IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)	0	0	0

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai <i>Total Remuneration per Person in 1 (one) year in cash</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>	Jumlah DPS <i>Number of BSS</i>
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) <i>Above IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) up to IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)</i>	0	2	0
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah <i>IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and below</i>	0	0	2

Jumlah yang tercantum diambil dari total Pendapatan (THP) Bruto per Tahun Buku 2022
The amount listed is taken from the total Gross Take Home Pay per Fiscal Year 2022

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

3. The ratio of the highest and lowest salaries

The salary that is compared in the salary ratio is the imbalance received by members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees in the last month of the reporting year.

The ratio of salary and lowest, in the following comparison scale:

- the ratio of the highest and lowest employee salaries;
- the ratio of the salaries of the highest and lowest members of the Board of Directors;
- the ratio of the salaries of the highest and lowest members of the Board of Commissioners; and
- the highest salary ratio for members of the Board of Directors and employees.

Rasio gaji
Salary ratio

- 5,94 : 1
- 1,17 : 1
- 1,11 : 1
- 3,22 : 1

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui *website* www.jamkrida-jabar.co.id dan media cetak.
3. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada *website*.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

The Company has prepared and presented reports by the provisions regarding the transparency of the Company's financial and non-financial conditions with the following details:

1. The Company has submitted Annual Financial Reports promptly to the Financial Services Authority and other interested parties.
2. The Company's Annual Financial Report is published through the website www.jamkrida-jabar.co.id and print media.
3. Information regarding guarantee service products issued by the company is available on the website.

RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN

1. Rencana strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a. Memperkuat portofolio produk penjaminan eksisting dan baru.
 - b. Mendorong sinergi dengan BUMD lainnya yang berorientasi pada profitabilitas.
 - c. Memperkuat dan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar melalui investasi sebagai resiprokal.
 - d. Meningkatkan efektivitas dan standardisasi proses kerja serta efisiensi proses internal dalam layanan klaim.
 - e. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM.
 - f. Meningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan *risk management* yang *prudent*.
 - g. Meningkatkan pendapatan, *market share*, dan *profitability* dengan mengedepankan *underwriting* yang *prudent*.
 - h. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi secara berkelanjutan.

CORPORATE STRATEGIC PLAN

1. Short-term strategic plan for 1 (one) year.
 - a. Strengthen the portfolio of existing and new guarantee products.
 - b. Encouraging synergies with other profitability-oriented BUMDs.
 - c. Strengthen and develop partnership networks for market penetration & expansion through reciprocal investment.
 - d. Increase effectiveness and standardization of work processes and efficiency of internal processes in claims services.
 - e. Improving HR competency and productivity.
 - f. Improving risk awareness culture and implementing prudent risk management.
 - g. Increase revenue, market share, and profitability by prioritizing prudent underwriting.
 - h. Develop information technology applications on an ongoing basis.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- | | |
|---|---|
| <p>2. Rencana strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas jaringan pemasaran melalui penambahan kantor pemasaran/unit pelayanan di beberapa kabupaten/kota. b. Mengintegrasikan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi secara terpadu. <p>3. Rencana strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas layanan dan jangkauan pemasaran pada perbankan BUKU 3 dan 4. b. Memperkuat dan memperluas jaringan pemasaran melalui pembukaan kantor perwakilan. c. Melakukan <i>Spin Off</i> Unit Usaha Syariah dengan syarat bahwa kontribusi kinerja Penjaminan syariah mencapai minimal 30% dari total portofolio penjaminan. <p>4. Rencana Kerja & Anggaran Tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proyeksi Volume Penjaminan tahun 2023 adalah senilai Rp10,18 triliun atau naik sebesar 55,65% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp6,54 triliun. Perseroan optimis penjaminan sektor produktif tumbuh sebesar 122,12%, sedangkan sektor non produktif tumbuh sebesar 19,73%. b. Proyeksi Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Accrual Basis tahun 2023 adalah senilai Rp213,35 miliar atau naik sebesar 22,49% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp174,18 miliar. Perseroan optimis IJP Accrual Basis sektor produktif tumbuh sebesar 42,33% sedangkan sektor non produktif tumbuh 15,14%. c. Proyeksi Total Aset tahun 2023 adalah senilai Rp577,24 miliar atau naik sebesar 19,42% jika dibandingkan | <p>2. Medium-term strategic plan for 3 (three) years.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Expanding the marketing network by adding marketing offices/service units in several districts/cities. b. Integrated information technology infrastructure and applications in an integrated manner. <p>3. Long-term strategic plan for 5 (five) years.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Expanding services and marketing outreach to BUKU 3 and 4 banking. b. Strengthening and expanding the marketing network through opening representative offices. c. Perform Sharia Business Unit Spin-Off with the condition that the performance contribution of Sharia Guarantee reaches a minimum of 30% of the total guarantee portfolio. <p>4. Annual Work Plan & Budget</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Guarantee Volume Projection in 2023 is IDR 10.18 trillion, an increase of 55.65% when compared to the 2022 Prognosis of IDR 6.54 trillion. The company is optimistic that the guarantee for the productive sector will grow by 122.12%, while the non-productive sector will grow by 19.73%. b. The Accrual Base Guarantee Fee (IJP) Projection in 2023 is IDR 213.35 billion, an increase of 22.49% compared to the 2022 Prognosis of IDR 174.18 billion. The company is optimistic that the IJP Accrual Base for the productive sector will grow by 42.33% while the non-productive sector will grow by 15.14%. c. The Total Asset Projection in 2023 is IDR 577.24 billion, an increase of 19.42% compared to the 2022 Prognosis of IDR 483.36 billion. |
|---|---|

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

- dengan Prognosa 2022 senilai Rp483,36 miliar.
- d. Proyeksi Total Ekuitas tahun 2023 adalah senilai Rp356,07 miliar atau naik sebesar 39,62% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp255,03 miliar.
 - e. Proyeksi Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2023 adalah senilai Rp81,38 miliar atau lebih rendah sebesar 16,56% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp97,53 miliar.
 - f. Proyeksi Total Liabilitas Jangka Panjang tahun 2023 adalah senilai Rp139,79 miliar atau naik sebesar 6,88% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp130,80 miliar.
 - g. Proyeksi Laba Tahun Berjalan tahun 2023 adalah senilai Rp8,19 miliar atau naik sebesar 14,89% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp7,42 miliar.
 - h. Proyeksi Management Fee tahun 2023 adalah senilai Rp13,00 miliar atau lebih rendah sebesar 33,97% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp19,66 miliar.
 - i. Proyeksi Biaya Akuisisi tahun 2023 adalah senilai Rp32,06 miliar atau tumbuh sebesar 23,19% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp26,02 miliar.
 - j. Proyeksi Pendapatan Investasi tahun 2023 adalah senilai Rp18,78 miliar atau tumbuh sebesar 45,05% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp12,94 miliar, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dana kelolaan investasi sebagai dampak dari adanya tambahan penyertaan modal dan pendapatan penjaminan.
 - k. Proyeksi Pendapatan Subrogasi tahun 2023 adalah senilai Rp3,07 miliar atau tumbuh sebesar 7,13% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp2,87 miliar.
 - l. Proyeksi Beban Klaim tahun 2023 adalah senilai Rp76,02 miliar atau
 - d. The Total Equity Projection for 2023 is IDR 356.07 billion, an increase of 39.62% compared to the 2022 Prognosis of IDR 255.03 billion.
 - e. The Total Short-Term Liabilities Projection in 2023 are worth IDR 81.38 billion or 16.56% lower compared to the 2022 Prognosis of IDR 97.53 billion.
 - f. The Total Long-Term Liabilities Projection in 2023 are worth IDR 139.79 billion, an increase of 6.88% compared to the 2022 Prognosis of IDR 130.80 billion.
 - g. The Profit Projection in 2023 is IDR 8.19 billion, an increase of 14.89% when compared to the 2022 Prognosis of IDR 7.42 billion.
 - h. The Management Fee Projection in 2023 is IDR 13.00 billion or 33.97% lower than the 2022 Prognosis of IDR 19.66 billion.
 - i. The Acquisition Cost Projection in 2023 is IDR 32.06 billion or a growth of 23.19% compared to the 2022 Prognosis of IDR 26.02 billion.
 - j. The Investment Income Projection in 2023 is Rp. 18.78 billion, growing by 45.05% compared to the 2022 Prognosis of IDR 12.94 billion, this is due to the growth in investment-managed funds as a result of additional equity participation and guarantee income.
 - k. The Subrogation Income Projection in 2023 is IDR. 3.07 billion or grows by 7.13% compared to the 2022 Prognosis of IDR 2.87 billion.
 - l. The Claim Expense Projection in 2023 is IDR 76.02 billion or grew by 37.48% compared to the 2022 Prognosis of IDR 55.29 billion, this is due to the potential increase in claims based on linear forecasting of claim data history for the past 3 years and projected claims for Excludes Reinsurance Treaty (there are several treaty exceptions for non-productive loans).

- tumbuh sebesar 37,48% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp55,29 miliar, hal ini disebabkan oleh potensi peningkatan klaim berdasarkan linier forecasting atas claim data history 3 tahun ke belakang dan proyeksi klaim atas Exclude Treaty Reasuransi (adanya beberapa pengecualian treaty atas kredit non produktif).
- m. Proyeksi Beban Operasional tahun 2023 adalah senilai Rp5,89 miliar atau tumbuh sebesar 53,81% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp3,83 miliar seiring dengan target pengembangan dan peningkatan pasar penjaminan, peningkatan target penerimaan subrogasi, dan verifikasi lapangan atas pengajuan klaim.
 - n. Proyeksi Beban Regaransi tahun 2023 adalah senilai Rp84,87 miliar atau lebih rendah sebesar 7,07% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp91,33 miliar, hal ini sejalan dengan proyeksi treaty Reasuransi.
 - o. Proyeksi Beban SDM tahun 2023 adalah senilai Rp22,72 miliar atau tumbuh sebesar 38,20% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp16,44 miliar. Pertumbuhan ini sejalan dengan adanya proyeksi penyesuaian SDM dan kenaikan harga BBM di masyarakat.
 - p. Proyeksi Beban Administrasi dan Umum tahun 2023 adalah senilai Rp9,12 miliar atau tumbuh sebesar 25,54% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp7,26 miliar. Hal ini dipengaruhi peningkatan aktivitas operasional Perseroan.
 - m. The Operating Expenses Projection in 2023 is IDR 5.89 billion, growing by 53.81% compared to the 2022 Prognosis of IDR 3.83 billion in line with the target of developing and increasing the guarantee market, increasing the target of subrogation receipts, and field verification of submitting claims.
 - n. The Reinsurance Expense Projection in 2023 is IDR 84.87 billion or 7.07% lower than the 2022 Prognosis of IDR 91.33 billion, this is in line with the Reinsurance treaty projection.
 - o. The HR Expense Projection in 2023 is IDR 22.72 billion or a growth of 38.20% compared to the 2022 Prognosis of IDR 16.44 billion. This growth is in line with the projected human resource adjustments and rising fuel prices in the community.
 - p. The General and Administrative Expenses Projection in 2023 are valued at IDR 9.12 billion or a growth of 25.54% compared to the 2022 Prognosis of IDR 7.26 billion. This is influenced by the increase in the Company's operational activities.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM
DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS WHICH ACHIEVE 5% (FIVE PER HUNDRED) OR MORE, WHICH COVERS TYPE AND NUMBER OF SHARE SHARE

No. No.	Nama Name	Kategori Kepemilikan Saham *) Category Ownership Share *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham Nominal Amount of Share Ownership	Persentase Kepemilikan Saham Percentage of Share Ownership
1	Tidak Ada None	A	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		B	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		C	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		D	Nihil Nothing	Nihil Nothing

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
The guarantor institution concerned;
- B. Lembaga Penjamin lain;
Other Guarantee Institutions;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin; dan
Financial services companies other than Guarantee Institutions; and
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
Other companies domiciled inside or outside the country, including shares acquired through the stock exchange.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

DISCLOSURE OF FINANCIAL RELATIONSHIPS AND FAMILY RELATIONSHIPS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MEMBERS OF THE BSS WITH OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, OTHER BSS MEMBERS, AND/OR SHAREHOLDERS OF PT JAMKRIDA JABAR

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

1. Financial relationships and family relationships of members of the Board of Directors with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the BSS, and/or PT Jamkrida Jabar shareholders

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Yanti Rachmawati	Direksi Lainnya Other Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	
2	Agus Subrata	Direksi Lainnya Other Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

2. Financial relationships and family relationships between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, members of the BSS, and/or PT Jamkrida Jabar shareholders

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Lainnya Other Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	
2	Dini Rosdini	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Lainnya Other Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

3. Financial relationships and family relationships of BSS members with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, other BSS members, and/or PT Jamkrida Jabar shareholders

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Zaini Abdul Malik	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		DPS Lainnya Other BSS		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
2	Khozin Abu Faqih	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		DPS Lainnya Other BSS		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Information:

The financial relationship is when a person receives income, financial assistance, or loans from members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors of the Guarantee Institution, Guarantee Institution whose controlling shareholders are members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors of the Guarantee Institution, and/or the controlling shareholder of the Institution Guarantor.

Family relationship is having a family relationship up to the second degree, both vertical and horizontal, including in-laws, son-in-law, and in-laws, so what is meant by family includes biological/step/adopted parents, siblings/step/adopted siblings and their husbands or wives, biological children /step/adoptive, biological/step/adopted grandparents, biological/step/adopted grandchildren, siblings/step/adopted parents and their husbands or wives, in-laws, in-laws, in-laws, husbands/wives of biological/step/adopted children, husband or wife's grandfather or grandmother, husband/wife of biological/step/adopted grandchildren, and biological/step/adopted siblings of husband or wife and their husband or wife

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA
OTHER IMPORTANT DISCLOSURES

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
Resignation or dismissal of the external auditor

Tidak Ada None

2. Transaksi material dengan pihak terkait
Material transactions with related parties

Tidak Ada None

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi
Ongoing and/or potential conflicts of interest

No. No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Position of Parties Having Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Position of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) <i>Transaction Value (Millions of Rupiah)</i>	Keterangan*) <i>Information*)</i>
1	-	-	-	-	-

Keterangan:

- *) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku
Not in accordance with applicable systems and procedures

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan During 2022, there were no transactions containing conflicts of interest in the Company
--

4. Informasi material lain mengenai PT Jamkrida Jabar
Other material information regarding PT Jamkrida Jabar

Tidak ada None

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen
Resignation or dismissal of the Independent Commissioner

Tidak ada None

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

6. Sertifikasi
Certification

No. No.	Materi Sertifikasi Certification Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
1	Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Guarantee Business Professional Certification	11 - 12 Juli 2022 July 11 – 12, 2022	PT Bintang Jamtama Sejahtera	Komisaris Independen Independent Commissioner
				Direktur Utama President Director
				Direktur Operasional Operational Director
2	Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Guarantee Business Professional Certification	26 Juli 2022 July 26, 2022	LSP Penjaminan	Direktur Operasional Operational Director
3	Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Guarantee Business Professional Certification	05 Agustus 2022 August 05, 2022	LSP Penjaminan	Direktur Utama President Director
				Komisaris Independen Independent Commissioner
4	Sertifikasi Auditor Hukum Legal Auditor Certification	18 Agustus 2022 August 18, 2022	Lembaga Jimly School of Law and Government	Staf Hukum Legal Staff
5	Sertifikasi Nasional CRMO Level II CRMO Level II National Certification	21 - 23, 25 & 28 November 2022 November 21 - 23, 25 & 28, 2022	LSPMR - RAP Learning Center	Staf Pengendalian Control Staff

7. Tenaga kerja asing
Foreign workers

Selama tahun 2022, Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing.
During 2022, the Company does not employ foreign workers.

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Nomor Uji Kepatutan & Kelayakan Number of Fit and Proper Test	KITAS Limited Stay Permit Card		IMTA Permit to Use Foreign Workers	
				Izin Kerja Work Permit	Masa Berlaku Validity Period	No. Izin No. Permit	Masa Berlaku Validity Period
1	-	-	-	-	-	-	-

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

8. Jumlah penyimpangan internal
Total internal fraud

Selama tahun 2022, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Perseroan.

During 2022, there were no internal fraud committed by the management, permanent employees or non-permanent employees of the Company.

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun <i>Internal fraud within 1 (one) year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh <i>Number of cases committed by</i>		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS <i>Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Sharia Supervisory</i>	Pegawai Tetap <i>Permanent Employee</i>	Pegawai Tidak Tetap <i>Temporary Employees</i>
Total penyimpangan Total fraud	-	-	-
Telah diselesaikan Resolved	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal In the process of internal completion	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian No solution yet	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up through the legal process	-	-	-

9. Permasalahan hukum
Legal problems

Selama tahun 2022, Perseroan tidak memiliki permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

During 2022, the Company will not have legal problems, both civil and criminal.

Permasalahan Hukum <i>Legal Problems</i>	Jumlah Kasus <i>Number of Cases</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Has obtained a decision that has permanent legal force a. b.	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK 2022**

Permasalahan Hukum <i>Legal Problems</i>	Jumlah Kasus <i>Number of Cases</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata In the process of settlement in court and in alternative dispute resolution institutions for civil cases	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>
a.		
b.		
Total <i>Total</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>

10. Etika bisnis Perusahaan
Company business ethics

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar.
The business ethics that are used as a reference for the Company and all employees are contained in the PT Jamkrida Jabar Code of Conduct.

Menyetujui,
Approve,

Direksi
Board of Directors

Yanti Rachmawati
Direktur Utama
President Director

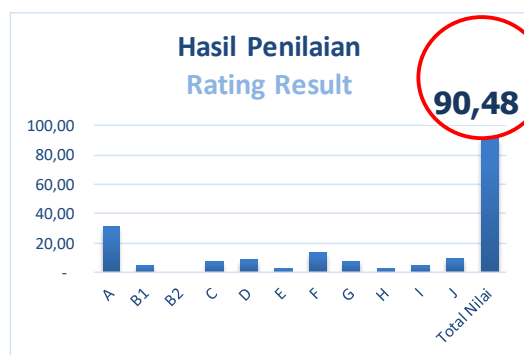
PENILAIAN SECARA MANDIRI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

SELF ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Untuk periode Tahun 2022 PT Jamkrida Jabar telah melakukan penilaian secara mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

For the 2022 period PT Jamkrida Jabar has conducted a self assessment of the implementation of Good Corporate Governance, with the following assessment results:

Ketentuan Penilaian Assessment Terms			Hasil Penilaian Rating Result		
Nilai Value	Rangking Rank	Predikat Predicate	Faktor Factor	Format Format	Nilai Value
84-100	1	Sangat Baik	1	A	30,68
68-83	2	Baik	2	B1	4,54
52-67	3	Cukup Baik		B2	-
36-51	4	Kurang Baik	3	C	7,17
20-35	5	Tidak Baik	4	D	8,60
			5	E	2,09
			6	F	13,00
			7	G	7,50
			8	H	2,50
			9	I	5,00
			10	J	9,40
				Total Nilai Total Value	90,48
				Predikat Predicate	Sangat Baik Very Good



Berdasarkan tabel Hasil Penilaian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Jamkrida Jabar dengan raihan nilai 90,48 (sembilan puluh koma empat puluh delapan), telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan predikat "Sangat Baik".

Based on the Assessment Results table above, it can be concluded that PT Jamkrida Jabar with a score of 90.48 (ninety point forty eight), has implemented Good Corporate Governance with the title "Very Good".

RENCANA TINDAK ACTION PLAN

Rencana tindak Perseroan di tahun 2023 akan melakukan beberapa tindakan korektif, yaitu:

- Melanjutkan proses review, memperbarui, dan melengkapi Standard Operating Procedure (SOP) secara bertahap di seluruh bagian (unit kerja);
- Melakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan organisasi secara menyeluruh sekalipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- Melakukan pengisian posisi Direktur Keuangan yang kosong melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku Pemegang Saham Mayoritas.
- Melakukan pengisian beberapa posisi jabatan yang kosong atau masih dirangkap.

The Company's action plan in 2023 will take several corrective actions, namely:

- Continuing the process of reviewing, updating, and completing the Standard Operating Procedure (SOP) in stages in all sections (work units);
- Make changes to the Organizational Structure and Work Procedure (SOTK) so that it can accommodate the needs of the organization as a whole even though the implementation is carried out in stages.
- Filling the vacant position of Director of Finance through a selection mechanism carried out by the West Java Provincial Government as the Majority Shareholder.
- Filling several vacant or concurrent positions.

Menyetujui,
Approve,

Direksi
Board of Directors

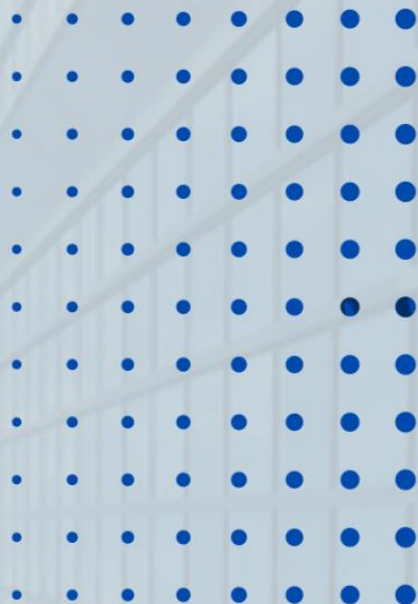
Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Pengawas Syariah
Board of Sharia Supervisory

Yanti Rachmawati
Direktur Utama
President Director

Muhammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris Utama
President Commissioner

Zaini Abdul Malik
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chair of the Board of Sharia Supervisory



20 G C G REPORT 22